

A Social Project To Empowering Micro, Small and Medium Enterprise in Batu Roto Village

Ishak Fadlurrohim¹

¹Program Studi
Kesejahteraan Sosial, FISIP
Universitas Bengkulu.

Article history

Received : 16 September 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted : 17 Juli 2026

*Corresponding author

Email: ishakfadlurrohim@unib.ac.id

No. doi: [10.24198/focus.v9i1.66812](https://doi.org/10.24198/focus.v9i1.66812)

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, tetapi banyak yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, dan kurangnya akses ke bantuan. Menanggapi hal tersebut, proyek sosial "Pelopor Desa 4.0" diluncurkan di Desa Batu Roto, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk memberdayakan pengusaha UMKM perempuan. Inisiatif ini, kolaborasi antara Grup Onschool Indonesia, Bank Bengkulu, dan pemerintah daerah, mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang menekankan partisipasi masyarakat dan berfokus pada kekuatan yang ada daripada defisit. Proyek ini menerapkan siklus aksi dan refleksi untuk mengatasi tantangan dengan kelompok UMKM untuk memahami kebutuhan mereka. metodologi yang digunakan dalam studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi. Pelatihan diberikan dalam pemasaran digital, produksi konten kreatif, dan literasi keuangan, yang mencakup manajemen arus kas dasar dan akuntansi. Selain itu, ia meluncurkan marketplace berbasis web untuk membantu UMKM dalam mempromosikan barangnya, melakukan transaksi yang aman, dan memperluas basis pelanggan mereka. Selain pencapaian nyata seperti mengelola 60 NPWP, 85 NIB, dan 10 sertifikasi halal, inisiatif ini menarik pemilik UMKM perempuan. Proyek ini menunjukkan bagaimana model pemberdayaan berbasis teknologi yang mendorong kolaborasi dapat meningkatkan kapasitas bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Kata kunci: Proyek Sosial ; Empowering ; Micro, Small and Medium Enterprise ;

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are vital for economic development in Indonesia, but many face challenges like limited capital, marketing difficulties, and lack of access to assistance. In response, the "Village Pioneer 4.0" social project was launched in Batu Roto Village, North Bengkulu Regency, to empower female MSME entrepreneurs. This initiative, a collaboration between the Onschool Indonesia Group, Bank Bengkulu, and local government, adopted an empowerment approach that emphasizes community participation and focuses on existing strengths rather than deficits. The project implemented a cycle of action and reflection to address challenges with MSME groups to understand their needs.

methodology used in a qualitative a case study with In-depth interviews, observations, documentation studies. Training was given in digital marketing, creative content production, and financial literacy, which included basic cash flow management and accounting. Additionally, it launched a web-based marketplace to assist MSMEs in promoting their goods, conducting safe transactions, and expanding their customer base. In addition to tangible accomplishments like managing 60 NPWP, 85 NIB, and 10 halal certifications, the initiative attracted female MSME owners. This project shows how a technology-based empowerment model that fosters collaboration can boost business capacity and enhance local communities' quality of life.

Key word: Proyek Sosial ; Empowering ; Micro, Small and Medium Enterprise

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam konsep dan implementasi model pemberdayaan masyarakat, yang masing-masing sesuai untuk aspek keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang berbeda (Nel, 2020). Karena lebih menekankan pada pemanfaatan aset masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan daripada berfokus pada kekurangannya, model Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset telah mengumpulkan banyak perhatian di antaranya (Maclure, 2023). Untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian masyarakat, Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset telah berhasil memobilisasi sumber daya lokal dan mendorong rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat (Forrester et al., 2018; Zhong, 2020). Masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, terutama di daerah pedesaan, karena ini akan menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan relevan secara kontekstual (Ebinger & Omondi, 2020). Saat ini, perencanaan pembangunan harus mencakup pemberdayaan masyarakat, terutama ketika mencoba

memerangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Mustanir et al., 2025). Sejumlah penelitian yang dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir telah menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dari bawah ke atas yang memberikan kebutuhan dan suara masyarakat lokal sebagai prioritas utama (Bernaschi, 2020). Menurut (Rwebugisa & Usinger, 2021), pemberdayaan dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, menjamin bahwa hasilnya menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan dan tahan lama. Model Pemberdayaan Keterlibatan-Partisipasi, yang diusulkan oleh (Markantoni et al., 2018)(Adams, 2008), menjadi fondasi pemberdayaan masyarakat. Ini menekankan lambatnya penyerahan otoritas dari pihak luar ke masyarakat lokal di daerah pedesaan yang miskin.

Salah satu tujuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk sektor industri pengolahan dalam rangka memenuhi visi dan misinya adalah pendirian pusat industri kecil. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong kontribusi perekonomian nasional, khususnya dari usaha kecil. Menurut Provinsi Bengkulu,

salah satu industri yang mendorong perekonomian daerah dan nasional adalah sektor pengolahan. Kontribusi ekonomi sektor ini yang signifikan memperjelas hal ini. Kontributor nasional terbesar terhadap PDB Indonesia adalah sektor pengolahan. Dengan 5,81 persen dari PDB provinsi 2020, sektor industri pengolahan menempati urutan keenam dalam hal kontribusi ekonomi daerah untuk Provinsi Bengkulu. Pengembangan industri mikro dan kecil, bagian dari pembangunan nasional, harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi jika pembangunan industri ingin memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Bagian penting dari perekonomian Indonesia adalah sektor pengolahan.

Sektor pengolahan di Provinsi Bengkulu menyumbang 5,48 persen dari PDB provinsi pada 2022. Kontribusi ekonomi industri pengolahan ke Provinsi Bengkulu bervariasi tetapi secara umum menurun antara tahun 2017 dan 2022. Wilayah Bengkulu adalah rumah bagi 18.789 bisnis dan perusahaan, menurut Survei Tahunan 2022. 18.789 perusahaan dan perusahaan secara keseluruhan Sisanya terdiri dari industri kecil, di mana 97,48 persen adalah industri mikro. persen. Pengembangan UMKM Di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara, angkanya sebesar 53,06 persen di Provinsi Bengkulu. terdiri dari 3.396 (18,07 persen) perusahaan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, 3.444 (18,33 persen) perusahaan di Kabupaten Rejang Lebong, dan 3.131 (16,66 persen) perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Kepahiang 420 (2,24 persen) dan Kabupaten Bengkulu Tengah 912 (4,85 persen). Penyebaran. Dengan 18,27 ribu dari 10,99 ribu (43,60 persen) yang bekerja, perempuan terdiri dari 50,62 persen dari tenaga kerja kelompok Industri Makanan, menurut asosiasi industri. Hampir 20.000 orang, atau 53,16 persen dari angkatan kerja, berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Dari sisi pendapatan usaha/perusahaan pada tahun 2021, Kota Bengkulu memimpin kabupaten/kota dengan total pendapatan Provinsi Bengkulu sebesar 46,56 persen. Persentase pendapatan tertinggi berikutnya terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara (15,09 persen) dan Kabupaten Bengkulu Selatan (9,35 persen). Dari 18,78 ribu usaha dan perusahaan, hanya 93,29 persen yang menghasilkan pendapatan lebih dari 500 juta rupiah per tahun, dan 1,99 persen menghasilkan kurang dari lima juta. Pertumbuhan usaha mikro kecil erat kaitannya dengan beberapa kendala dan kesulitan. Dari 18,78 ribu usaha/perusahaan, hanya 12,89 persen yang mengatakan tidak kesulitan beroperasi, sedangkan 87,10 persen mengatakan memiliki masalah.

Secara umum, perusahaan dan bisnis masih menerima dukungan atau layanan yang sangat sedikit. Mayoritas, 97,04 persen, menyatakan belum pernah menerima bantuan tersebut, sementara hanya 2,95 persen usaha/perusahaan yang melaporkan telah menerima layanan atau bantuan. Hanya 2,31 persen bisnis yang menjalin kemitraan, dan 97,69 persen bisnis/perusahaan memilih menunggu hingga 2022 untuk melakukannya. 2,19 persen kemitraan pemasaran adalah jenis kemitraan yang telah dipraktikkan. Memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di sekitar perusahaan atau bisnis adalah tujuan utama pemasaran produk. Sementara itu, pemasaran di luar kabupaten atau kota, serta di luar provinsi, tetap buruk dan dapat ditingkatkan.

Fokus utama proyek sosial pada tahun 2024 adalah inisiatif Village Pioneer 4.0: Empowering UMKM Women for a Sustainable Future dari Onschool Indonesia Group, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya perempuan di Desa Batu Roto, Kabupaten Bengkulu Utara. Dasar dari upaya proyek ini untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah teknologi digital. Melalui penerapan pelatihan dan kemajuan

teknologi, diharapkan kegiatan ini mampu memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pembangunan ekonomi desa. Kegiatan diawali dengan pelatihan pembuatan konten kreatif dan pemasaran digital. Tujuan pelatihan ini adalah untuk membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara efektif di media sosial dan platform online lainnya. Peserta juga belajar bagaimana menggunakan tren digital, seperti algoritma media sosial, fotografi produk, dan storytelling, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Pelatihan ini merupakan langkah awal untuk membuat peserta lebih kompetitif di era digital. Peserta juga menerima pelatihan keuangan inklusif dan akuntansi dasar untuk membantu mereka memahami cara mengelola keuangan bisnis mereka secara efektif. Proyek ini memberikan pelatihan tentang manajemen arus kas, pembukuan dasar, dan akses layanan keuangan formal. Hal ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Bengkulu. Diharapkan peningkatan literasi keuangan akan membantu UMKM mengurangi risiko keuangan dan memaksimalkan keuntungan (Rakhmawati et al., 2025). Inovasi teknologi juga menjadi fokus utama. Fitur ini memfasilitasi transaksi yang aman, pemasaran produk, dan memanfaatkan dukungan promosi yang relevan bagi pelaku UMKM (Feranika, 2022). Dengan bantuan teknologi ini, Desa Batu Roto akan menjadi desa digital pertama di Bengkulu yang mampu bersaing dalam skala global dengan barang-barang lokal berkualitas tinggi. Evaluasi dan pemantauan penerapan teknologi dan pelatihan yang ditawarkan menandai akhir dari kegiatan ini. (Karlan & Zinman, 2011) Program ini juga menjamin kelanjutan dukungan bagi pelaku UMKM setelah pelaksanaan proyek melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, DPRD, dan Bupati Bengkulu Utara. Onschool Indonesia Group berharap Village Pioneer 4.0 berkembang menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis teknologi yang dapat diadopsi oleh desa Indonesia lainnya.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam melihat pemberdayaan kelompok UMKM di Batu Roto, Bengkulu Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Para informan tersebut meliputi 60 kelompok UMKM yang mengikuti program Myinnovillage 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Incorporating Anti-Oppression

Praktik anti-penindasan memperbaiki penindasan dan pengucilan sosial melalui fokusnya pada pembebasan, emansipasi, dan pemberian hak anggota kelompok rentan dan tertindas. Fitur utama dari praktik anti-penindasan termasuk menggambar pada dasar teori dan nilai-nilai yang mendukung pembagian kekuasaan yang egaliter, secara kritis merefleksikan lokasi sosial seseorang dan pengaruh lokasi itu pada hubungan praktik, menantang struktur sosial yang menindas dan dominasi oleh kelompok yang kuat, dan menggunakan strategi praktik kolaboratif yang memfasilitasi pemberdayaan (Dominelli & Campling, 2002). Ini jelas mencerminkan mandat keadilan sosial. Praktik anti-penindasan membawa kejelasan dengan cara yang dapat ditindaklanjuti untuk cita-cita keadilan sosial. Audiensi dengan anggota kelompok UMKM yang memiliki akses terbatas terhadap pengembangan bisnis dan informasi terkait program pemerintah yang dapat mendukung perekonomian di masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak banyak informasi yang didapatkan, seperti bantuan modal usaha dalam merangsang permodalan kelompok UMKM, keterbatasan informasi dalam pembuatan NIB, sertifikasi halal, dan akses pasar. Tim melakukan audiensi dengan kantor koperasi dan UKM serta Bank Bengkulu untuk membantu memfasilitasi kelompok UMKM disertai dengan kesepakatan bersama yang jelas dalam mendorong

kegiatan pemberdayaan kelompok UMKM melalui Onschool Indonesia yang menjembatani masyarakat rentan, khususnya ibu rumah tangga, untuk diberdayakan (Souza, 2018). Pemberdayaan adalah proses interpersonal yang inheren di mana individu secara kolektif mendefinisikan dan mengaktifkan strategi untuk mendapatkan akses ke pengetahuan dan kekuasaan. Untuk menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai dasar bagi pelaku UMKM untuk memahami pengelolaan modal yang baik. Hasil audiensi ini menghasilkan beberapa rencana kerjasama, antara lain pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, pengenalan produk perbankan yang relevan, dan pendampingan pengajuan pinjaman usaha. (Andayani et al., 2023)

Prioritas Penilaian Pedesaan Partisipatif (PRA) yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan proses pengambilan keputusan partisipatif (Mustanir et al., 2025). Komunitas berkelanjutan tidak spontan tetapi membutuhkan fasilitasi terstruktur, pembelajaran komunitas berkelanjutan, dan inisiatif pengembangan kapasitas strategis yang memberdayakan masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara efektif. (Mertler, 2017). Fase dialog dan tindakan kolektif yang bergantian, adalah elemen mendasar dari pemberdayaan. Diterapkan dalam praktik, praksis – atau siklus tindakan-refleksi-tindakan yang berkelanjutan memastikan bahwa klien dapat menggambarkan pengalaman mereka dengan kondisi yang menindas melalui dialog dengan orang lain. Melalui wacana reflektif tentang pengalaman mereka, klien menemukan kemungkinan tindakan yang dapat diambil di tingkat pribadi, interpersonal, dan politik. (digunakan untuk mengkonsolidasikan dan memperdalam pekerjaan mengembangkan pemahaman kritis dan visi untuk perubahan sosial" (Putri et al., 2023), dalam implementasi, klien dan pekerja sosial memulai tindakan untuk mencapai visi dan merefleksikan proses dan hasil dari upaya perubahan.

Salah satu kegiatan aksi sosial yang ditampilkan adalah menjadikan Desa Perintis 4.0 menuju ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital untuk masa depan yang berkelanjutan. Aksi sosial adalah kunci pemberdayaan sosial politik dan merupakan warisan profesi kerja sosial (Jacobson & Rugeley, 2007). Aksi kolektif berusaha untuk mengalokasikan kembali kekuatan sosial politik sehingga warga negara yang kehilangan hak dapat mengakses peluang dan sumber daya masyarakat dan, pada gilirannya, menemukan cara yang berarti untuk berkontribusi pada masyarakat sebagai warga negara yang dihargai. Tindakan sosial tidak secara eksklusif domain praktisi makro. Praktisi generalis yang bekerja terutama dengan klien tingkat mikro juga melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi di masyarakat, birokrasi, dan masyarakat. Misalnya, mereka dapat bertindak sebagai advokat untuk berbicara dengan klien di tingkat kelembagaan dan politik untuk memengaruhi perubahan dalam kebijakan sosial. Dengan cara ini, praktisi bekerja dalam orasi kolaborasi dengan klien untuk menciptakan perubahan sosial dan politik (Kim, 2016; Norton, 2024; Payne, 2018). Pemberdayaan mengacu pada perspektif praktik yang disajikan sejauh ini. Pendekatan ini menerapkan perspektif ekosistem. Ini mengaktualisasikan orientasi kekuatan melalui asumsi keahlian klien dan penekanan yang konsisten pada peran kolaboratif untuk kedua kelompok UMKM dalam program My Innovillage 2024. Pada akhirnya, ini bekerja untuk mencapai pemberdayaan bagi klien di tingkat pribadi, interpersonal, dan sosial politik dari pengalaman manusia.

2. Infusing an Ecosystems Perspective

Perspektif ekosistem meneliti interaksi sistem manusia dengan lingkungannya baik untuk memahami apa yang terjadi dan untuk mengembangkan strategi untuk memulai perubahan. Konsisten dengan perspektif ekosistem, pemberdayaan untuk

melihat tantangan dan kekuatan dalam konteks, untuk mengidentifikasi banyak kemungkinan jalan menuju solusi, dan untuk mengenali bahwa perubahan dalam sistem tertentu bergema melalui tingkat sistem lainnya (Lidia & Suharyanti, 2023). Setiap fase dari pendekatan ini mengakomodasi transaksional dengan mempertimbangkan. Diinformasikan oleh perspektif ekosistem, pekerja dapat menemukan sumber daya untuk perubahan yang ada di seluruh ekosistem di mana hubungan mereka dengan klien ada. Upaya ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya di daerah yang masih tertinggal seperti Desa Batu roto. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Desa Batu roto dapat mengatasi kendala yang ada dan mengoptimalkan potensi pertaniannya untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Paredes et al., 2019). Proyek sosial digitalisasi UMKM Onschool.id di Desa Batu roto bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa di bidang pertanian dan UMKM melalui teknologi digital. masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi inisiatif pembangunan, yang mengarah pada hasil yang lebih sesuai dan berkelanjutan secara kontekstual (Novanda et al., 2021) (Surin et al., 2015). Dengan fitur-fitur inovatif, seperti AI Komunitas dengan Influencer Mikro Lokal dan Investasi Mikro Berbasis Blockchain, proyek ini mengatasi tantangan aksesibilitas dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Program ini menawarkan solusi berbasis teknologi seperti platform pelatihan, pemasaran digital berbasis AI, dan investasi mikro yang transparan, memungkinkan petani dan UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas dan mendapatkan dukungan finansial dari investor kecil (Dela Cruz et al., 2023) (Indra et al., 2021). Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberdayakan secara ekonomi tetapi juga memberikan pengalaman interaktif untuk mengembangkan keterampilan baru di

kalangan masyarakat desa. Kelompok UMKM dalam program My Innovillage 2024.

3. Reflecting a Social Justice

Berpartisipasi dalam mendefinisikan apakah suatu masyarakat itu adil. Jika memaksakan pandangan budaya yang dominan tentang perilaku manusia, berfungsi untuk mengendalikan penyimpangan seperti yang didefinisikan oleh nilai-nilai mayoritas, dan menawarkan solusi ahli untuk masalah klien, mereka memperkuat dan melanggengkan penindasan. Sebaliknya, jika selaras dengan pandangan dunia, mendefinisikan masalah secara transaksional, dan mencari solusi dalam perubahan sosial dan politik, mereka mendorong masyarakat ke arah keadilan sosial. (Hamidaturrahim et al., 2023) (Bernaschi, 2020). Proses dalam pendekatan berorientasi pemberdayaan ini secara konsisten mengungkapkan berpusat pada klien yang diperlukan dan fokus pada kondisi lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen pekerjaan sosial terhadap keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mencerminkan keadilan sosial dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan 3T (Terdepan, Terdalam dan Tertinggal) berarti memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga mengatasi ketimpangan struktural yang telah lama membatasinya. Ini bukan hanya memberikan bantuan, tetapi membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Model Pembangunan yang Dipimpin Masyarakat menggarisbawahi pentingnya inisiatif dan kepemimpinan yang digerakkan oleh masyarakat (Loha, 2023). Pendekatan ini telah diakui untuk memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkan kapasitas kepemimpinan dan memastikan bahwa proyek pembangunan selaras erat dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Mc Call ET Al., 2017). Alih-alih model layanan, pengembangan yang dipimpin komunitas

(CLD) adalah cara berpikir yang didukung oleh (Loha, 2023) Komunitas yang menginspirasi telah menyusun prinsip-prinsip ini dengan bekerja sama dengan (Pantidi et al., 2015).

Pemberdayaan UMKM berbasis keadilan sosial berfokus pada tiga prinsip utama: 1. Pengakuan dan Rasa Hormat: Mengenali keberadaan, kearifan lokal, dan potensi unik masing-masing komunitas UMKM di wilayah 3T. Ini termasuk menghargai pengetahuan tradisional dan keragaman budaya sebagai aset, bukan hambatan. 2. Redistribusi: Mendistribusikan sumber daya, seperti modal, pelatihan, teknologi, dan akses pasar, lebih adil. Hal ini dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dan terisolasi, yang seringkali kesulitan bersaing dengan UMKM di perkotaan. 3. Partisipasi dan Pemberdayaan: Memberdayakan UMKM 3T agar memiliki suara dan peran aktif dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan Masyarakat berasal dari (Markantoni et al., 2018), yang mengusulkan Model Pemberdayaan Partisipasi-Keterlibatan, yang menekankan transfer kekuasaan secara bertahap dari aktor eksternal ke masyarakat lokal di lingkungan pedesaan yang kurang beruntung. (Carrick-Hagenbarth, 2021) menunjukkan bagaimana inisiatif ekonomi kreatif di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan mendorong kemajuan ekonomi dan produktivitas. (Olko, 2018) melihat Mengeksplorasi peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan Indonesia. Studi mereka menemukan bahwa menerapkan strategi kompas sosial, yang mencakup manajemen sumber daya, teknologi, dan kepemimpinan, secara signifikan berkontribusi untuk membangun komunitas mandiri yang mampu menopang diri mereka sendiri secara ekonomi dan sosial. Ini memastikan bahwa program yang dibuat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mereka, bukan hanya program "top-to-bottom" yang dipaksakan. Melalui program

Myinnovillage 2024, merupakan inisiatif dalam bergerak menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Applying a Strengths Orientation

Sebagai lensa untuk melihat klien, perspektif kekuatan menggeser pandangan klien dari patologi menuju potensi. Pertanyaan mendasar beralih dari "apa yang salah" menjadi "apa yang tersedia" dalam klien dan lingkungan mereka untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Proses kerja sosial yang berorientasi pada kekuatan menggambarkan metode bagi klien untuk menemukan apa yang mungkin berguna di masa kini untuk membangun masa depan yang lebih positif (Macgowan, 2009). Menumbuhkan kekuatan dan sumber daya klien di semua fase proses praktik sangat penting untuk menerapkan pendekatan berbasis pemberdayaan untuk praktik pekerjaan sosial. Namun, hanya mengadopsi perspektif kekuatan tidak cukup dalam banyak situasi. Mengaktifkan kekuatan klien menjadi paling efektif dalam lingkungan yang adil secara sosial dan ekonomi di mana peluang dapat diakses oleh semua orang (Miley & Dubois, 2007).

Pelatihan kelompok UMKM merupakan langkah awal dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam bersaing di era digital. Selain itu, pelatihan keuangan inklusif dan akuntansi sederhana diberikan untuk membantu peserta memahami cara mengelola keuangan bisnis mereka dengan baik. Bekerja sama dengan Bank Bengkulu, kegiatan ini meliputi edukasi tentang pengelolaan arus kas, pembukuan sederhana, dan akses ke layanan keuangan formal. (Gitterman et al., 2013)(Nawaz, 2019) dengan literasi keuangan yang lebih baik, UMKM diharapkan dapat mengoptimalkan keuntungannya sekaligus meminimalisir risiko keuangan. Inovasi teknologi juga menjadi fokus utama dengan pengembangan marketplace berbasis website yang dilengkapi dengan fitur ChatGPT, blockchain, dan influencer marketing. Fitur ini memudahkan pelaku

UMKM untuk memasarkan produk, bertransaksi dengan aman, dan memanfaatkan dukungan promosi dari influencer terkait. Teknologi ini dirancang untuk menjadikan Desa Batu Roto sebagai desa digital pertama di Bengkulu, yang mampu bersaing secara global dengan produk lokal yang berkualitas.

(Ansell & Gash, 2008) menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, asalkan dikelola dengan pendekatan kelembagaan. Rekomendasi masa depan untuk model pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah perlunya transformasi kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif pemberdayaan. Ini termasuk penguatan kapasitas kelembagaan desa, penerapan sistem pemantauan yang transparan, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Cai, 2022). Menekankan pentingnya aksi kolektif berbasis partisipatif dan dukungan kebijakan yang kuat untuk meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah pedesaan yang kurang berkembang.

5. Collaborating with Clients and Constituencies

Orientasi terhadap kekuatan mendefinisikan ulang hubungan pekerja sosial-klien. Mengakui keahlian klien, pekerja sosial bermitra dengan klien di semua tingkat sistem. Mereka berkolaborasi untuk menciptakan visi tentang apa yang ingin mereka capai dan kemudian memusatkan upaya mereka untuk mencari sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Kolaborasi mempercayakan hak dan tanggung jawab kepada klien, mendorong klien untuk menemukan solusi mereka sendiri dan tetap bertanggung jawab atas perubahan mereka sendiri. (Ahmed et al., 2020) Dalam pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, klien merasakan kekuasaan mereka sendiri dalam proses

kerja sosial dan membawa perasaan kompetensi dan kontrol ini melampaui batas-batas hubungan mereka dengan pekerja sosial.

Kolaborasi bukan hanya kerja sama, tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, tantangan, dan aspirasi klien (UMKM) dan konstituen (masyarakat lokal, pemerintah daerah, LSM, akademisi, dll). (Pahlevi & Rahab, 2022) (Prawira D. & Dewi, 2019) dalam konteks UMKM 3T, kolaborasi yang efektif berarti: 1. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan UMKM secara aktif sejak awal perencanaan program. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi mitra strategis yang memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman lapangan. Ini memastikan bahwa solusi yang ditawarkan relevan dan sejalan dengan realitas di lapangan. 2. Bangun Kepercayaan: Kepercayaan adalah fondasi utama. Hal ini dibangun melalui komunikasi yang transparan, konsistensi dalam tindakan, dan menghormati masukan dari semua pihak. Klien dan konstituen harus merasa dihargai dan didengarkan. 3. Berbagi Peran dan Tanggung Jawab: Identifikasi kekuatan masing-masing pihak dan bagi peran dan tanggung jawab secara adil. Misalnya, UMKM fokus pada produksi dan inovasi, pemerintah daerah menyediakan infrastruktur, LSM memberikan bantuan teknis, dan akademisi melakukan penelitian. Namun, jumlah kegiatan bisnis dan karyawan dalam kelompok perlakuan menurun relatif terhadap kontrol, dan kesejahteraan subjektif sedikit menurun. Kami juga menemukan sedikit bukti bahwa efek pengobatan lebih jelas untuk pinjaman mikro wanita, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi risiko, memperkuat ikatan masyarakat, dan meningkatkan akses ke kredit informal. (Giernik et al., 2017) Motivasi untuk perluasan kredit mikro yang berkelanjutan, atau setidaknya untuk aliran subsidi yang berkelanjutan ke pemberi pinjaman nirlaba dan nirlaba, adalah anggapan bahwa memperluas akses kredit adalah cara yang relatif efisien untuk

memerangi kemiskinan dan mempromosikan pertumbuhan. Namun terlepas dari klaim kuat tentang efek kredit mikro pada peminjam dan bisnis mereka.

6. Constructing an Empowering Reality

Konsisten dengan perspektif konstruksionis sosial, penelitian menunjukkan bahwa sikap dan keyakinan pra membantu seorang profesional dan praktik pemberian bantuan dari program layanan sosial memengaruhi pengalaman pemberdayaan klien. Penelitian ini juga menegaskan bahwa atribusi positif dan orientasi program membuat perbedaan dalam efektivitas pekerja sosial. Metode praktik pemberdayaan yang diperkenalkan dalam bab ini secara konsisten menggambarkan proses kerja sosial dalam bahasa yang membingkai realitas yang berorientasi pada masa depan, jenuh solusi, dan memvalidasi klien. Efektif dengan sengaja membangun "realitas praktik" yang memberdayakan dengan mengarahkan diri mereka pada kekuatan, pemberdayaan, dan kolaborasi klien. (Onkelinx et al., 2016). Mereka mengembangkan asumsi produktif tentang klien dan proses praktik. Pemberdayaan adalah 'proses yang melibatkan penggunaan kreatif sumber daya pribadi seseorang untuk mendapatkan dan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan keadaan hidup seseorang, mencapai tujuan pribadi dan meningkatkan kebaikan relasional dan komunal (Adams, 2008). Pemberdayaan melibatkan individu dan komunitas yang memperoleh sumber daya yang akan meningkatkan kekuatan spiritual, politik, sosial atau ekonomi mereka untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas lingkungan mereka dan bergerak menuju aspirasi pribadi atau komunal mereka (Mustanir et al., 2025; Ridwan Maksun et al., 2020). Pendekatan pemberdayaan dapat dimanfaatkan secara kolaboratif dengan individu, kelompok atau komunitas.

Berkolaborasi dengan klien dan konstituen sangat penting untuk membangun realitas yang memberdayakan.

Ini berarti bekerja dengan orang-orang, bukan hanya untuk mereka, untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan bahwa hasil benar-benar menguntungkan mereka yang terlibat. Pendekatan ini menumbuhkan kepemilikan, membangun kapasitas, dan mengarah pada perubahan yang lebih berkelanjutan dan berdampak (Trimulato et al., 2021). Berkolaborasi dengan klien dan konstituen sangat penting untuk membangun realitas yang memberdayakan. Ini berarti bekerja dengan orang-orang, bukan hanya untuk mereka, untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan bahwa hasil benar-benar menguntungkan mereka yang terlibat.

Pendekatan ini menumbuhkan kepemilikan, membangun kapasitas, dan mengarah pada perubahan yang lebih berkelanjutan dan berdampak. Kolaborasi yang efektif dengan klien dan konstituen melibatkan beberapa prinsip inti: 1. Mendengarkan dan Empati Aktif: Benar-benar mendengar dan memahami perspektif, kebutuhan, dan aspirasi orang-orang yang bekerja dengan Anda. Ini membutuhkan mengesampingkan asumsi dan mendekati interaksi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang tulus. 2. Pengambilan Keputusan Bersama: Memberdayakan klien dan konstituen untuk memiliki suara yang berarti dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi inisiatif. Ini menjauh dari arahan top-down menuju model kemitraan. 3. Pengembangan Kapasitas: Menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan bagi individu dan komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan swasembada dan ketahanan. 3. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga komunikasi terbuka tentang tujuan, kemajuan, dan tantangan. Bertanggung jawab kepada klien dan konstituen memastikan kepercayaan dan memperkuat hubungan. 4. Menghormati Keragaman: Mengenali dan menghargai pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang unik dari semua individu dan kelompok. Pendekatan inklusif ini

memastikan bahwa solusi relevan dan efektif untuk semua orang. Mempraktikkan Kolaborasi di Myinnovillage Program menekankan prinsip Penilaian Kebutuhan: Melakukan penilaian kebutuhan partisipatif di mana klien dan konstituen terlibat aktif dalam mengidentifikasi tantangan dan memprioritaskan solusi. 1. Desain bersama Program: Libatkan pengguna akhir dalam fase desain program, lokakarya, atau layanan untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan nyata dan sesuai dengan budaya. 2. Tim Implementasi Bersama: Bentuk tim yang mencakup fasilitator/ahli eksternal dan anggota kelompok klien untuk mengawasi pelaksanaan proyek. 3. Mekanisme Umpan Balik Reguler: Tetapkan saluran yang jelas untuk umpan balik yang berkelanjutan, seperti rapat rutin, survei, atau kotak saran, dan tunjukkan bagaimana umpan balik digunakan. 4. Bimbingan dan Dukungan Sebaya: Memfasilitasi kesempatan bagi individu dalam kelompok klien untuk belajar dan mendukung satu sama lain, membangun jaringan keahlian internal. Dengan memprioritaskan kolaborasi, Anda tidak hanya memberikan layanan atau proyek; Anda membantu membangun realitas yang memberdayakan di mana individu dan komunitas adalah agen aktif dalam pengembangan dan kesuksesan mereka sendiri.

(Cai, 2022) Merekomendasikan juga Model Quadruple-Helix sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat untuk mencapai keberlanjutan di era industri Industri 4.0. Namun, ekosistem kolaborasi menuntut platform yang fleksibel, dinamis, dan terbuka. Dari kedua negara, kita juga dapat belajar bahwa kolaborasi atau kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk misi sosial untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UKM mencapai tujuan jika para aktor dalam kolaborasi memiliki nilai yang sama. (Ansell & Gash, 2008). Ditambahkan, kolaborasi aktor negara dan non-negara juga berarti bahwa setiap aktor yang berkolaborasi berbagi pertanggungjawaban atas konsekuensi

kebijakan, yang oleh karena itu mengharuskan pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

SIMPULAN

Kelompok Pemberdayaan Partisipatif efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota kelompok UMKM yang mengalami kerentanan ekonomi yang terlibat dalam kelompok yang dilaporkan lebih banyak pemberdayaan daripada kelompok kontrol. Partisipasi dalam lingkungan masyarakat mengarah pada perasaan pemberdayaan yang lebih besar, yang dibuktikan bahwa anggota kelompok UMKM di desa Batu Roto mengalami peningkatan pemahaman dan pandangan dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan legalitas bisnis, pengelolaan pembukuan dan penggunaan platform media website untuk mempromosikan jenis usaha dan meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tindakan secara sukarela untuk kepentingan kelompok didorong dengan baik untuk membuat pemberdayaan berjalan terus menerus. Penelitian ini menunjukkan efektivitas interaksi dengan kelompok dalam meningkatkan pemberdayaan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. (2008). Understanding empowerment. In *Empowerment, participation and social work* (pp. 3–27). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-05053-3_1
- Ahmed, Z., Asghar, M. M., Malik, M. N., & Nawaz, K. (2020). Moving towards a sustainable environment: The dynamic linkage between natural resources, human capital, urbanization, economic growth, and ecological footprint in China. *Resources Policy*, 67, 101677. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101677>

- Andayani, E., Mirlana, D. E., & Subagyo, A. (2023). PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS EKONOMI KREATIF DI LAPAK PESONA. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 22(3), 181. <https://doi.org/10.31293/pd.v22i3.7242>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bernaschi, D. (2020). *Collective Actions of Solidarity and Their Impact in Terms of Capabilities* (pp. 19–31). https://doi.org/10.1007/978-3-658-31375-3_3
- Cai, Y. (2022). Neo-Triple Helix Model of Innovation Ecosystems: Integrating Triple, Quadruple and Quintuple Helix Models. *Triple Helix*, 9(1), 76–106. <https://doi.org/10.1163/21971927-bja10029>
- Carrick-Hagenbarth, J. (2021). (Mis)Conceptualising Empowerment: Flaws in Community-driven Development Project Design. *International Journal of Rural Management*, 17(2), 213–238. <https://doi.org/10.1177/0973005220984558>
- Dela Cruz, N. A., Villanueva, A. C. B., Tolin, L. A., Disse, S., Lensink, R., & White, H. (2023). PROTOCOL: Effects of interventions to improve access to financial services for micro-, small- and medium-sized enterprises in low- and middle-income countries: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 19(3). <https://doi.org/10.1002/cl2.1341>
- Dominelli, L., & Campling, J. (2002). Anti-Opressive Practice in Action. In *Anti-Opressive Social Work Theory and Practice* (pp. 109–140). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-4039-1400-2_6
- Ebinger, F., & Omondi, B. (2020). Leveraging Digital Approaches for Transparency in Sustainable Supply Chains: A Conceptual Paper. *Sustainability*, 12(15), 6129. <https://doi.org/10.3390/su12156129>
- Feranika, A. (2022). PELATIHAN DIGITAL MARKETING DAN PENGENALAN APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN PADA KELOMPOK UMKM SAHABAT MAHNIES DAN KELOMPOK WIRAUSAHA PEMULA (KWP) DI KOTA JAMBI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA*, 1(1). <https://doi.org/10.33998/jpmu.2022.1.1.40>
- Forrester, J., Taylor, R., Pedoth, L., & Martin, N. (2018). Wicked Problems. In *Framing Community Disaster Resilience* (pp. 61–75). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119166047.ch5>
- Gielnik, M. M., Uy, M. A., Funken, R., & Bischoff, K. M. (2017). Boosting and sustaining passion: A long-term perspective on the effects of entrepreneurship training. *Journal of Business Venturing*, 32(3), 334–353. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.02.003>
- Gitterman, A., Germain, C. B., & Knight, C. (2013). Ecological Framework. In *Encyclopedia of Social Work*. NASW Press and Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.118>

- Hamidaturrahim, R., Wilodati, & Wulandari, P. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Legalitas Usaha Di Desa Cikahuripan, Lembang. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 64–70.
<https://doi.org/10.37802/society.v4i1.371>
- Indra, A., Wibowo, B., Sembiring, S., & Metalia, M. (2021). The Effect of Profitability and Growth on Micro Small and Medium Enterprise (MSME) Capital Structure with The Size of The Company as a Control Variable. *Proceedings of the First International Conference of Economics, Business & Entrepreneurship, ICEBE 2020, 1st October 2020, Tangerang, Indonesia*.
<https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2020.2305573>
- Jacobson, M., & Rugeley, C. (2007). Community-Based Participatory Research: Group Work for Social Justice and Community Change. *Social Work With Groups*, 30(4), 21–39.
https://doi.org/10.1300/J009v30n04_03
- Karlan, D., & Zinman, J. (2011). Microcredit in Theory and Practice: Using Randomized Credit Scoring for Impact Evaluation. *Science*, 332(6035), 1278–1284.
<https://doi.org/10.1126/science.1200138>
- Kim, K. (2016). Fundraising for Social Change. In *Fundraising for Social Change*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119228837.ch6>
- Lidia, E., & Suharyanti, S. (2023). Dukungan dan Inovasi Era Digital sebagai Pemberdayaan Ekosistem UMKM (Strategi Positioning Rumah BUMN BRI dalam Sektor UMKM). *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi*, 13–17.
<https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.356>
- Loha, W. (2023). *Community-Led Development: Perspectives and Approaches of Four Member Organizations*.
<https://doi.org/10.32388/R1W3AV>
- Macgowan, M. J. (2009). Group Work across Populations, Challenges, and Settings. In *Social Work*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/obo/9780195389678-0032>
- Maclure, L. (2023). Augmentations to the asset-based community development model to target power systems. *Community Development*, 54(1), 4–17.
<https://doi.org/10.1080/15575330.2021.2021964>
- Markantoni, M., Steiner, A., Meador, J. E., & Farmer, J. (2018). Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland. *Geoforum*, 97, 142–154.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.022>
- Mc Call ET AL., G. J. (2017). A Collaborative Overview of Social Relationships. In *Friendship as a Social Institution* (pp. 171–182). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203791493-6>
- Mertler, C. A. (2017). Professional learning communities. In *Action Research Communities* (pp. 31–50). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315164564-3>
- Miley, K., & Dubois, B. (2007). Ethical Preferences for the Clinical Practice of

- Empowerment Social Work. *Social Work in Health Care*, 44(1-2), 29-44.
https://doi.org/10.1300/J010v44n01_04
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(3), 400.
<https://doi.org/10.22146/jsp.99202>
- Nawaz, F. (2019). From Individual to Community Empowerment. In *Microfinance and Women's Empowerment in Bangladesh* (pp. 71-83). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13539-3_5
- Nel, H. (2020). STAKEHOLDER ENGAGEMENT: ASSET-BASED COMMUNITY-LED DEVELOPMENT (ABCD) VERSUS THE TRADITIONAL NEEDS-BASED APPROACH TO COMMUNITY DEVELOPMENT. *Social Work*, 56(3).
<https://doi.org/10.15270/56-4-857>
- Norton, M. A. (2024). *Social Entrepreneur*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.U245538>
- Novanda, R. R., Saputra, H. E., Priyono, B. S., & Sriyoto, S. (2021). Investigation and Analysis on the Factors Influencing the Use of E-Commerce for Marketing SMEs' Dairy Products: A Case Study at SUSDAGTEL SMEs in Bengkulu, Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 37(1), 26.
<https://doi.org/10.20961/carakatani.v37i1.46498>
- Olko, J. (2018). Acting in and through the Heritage Language: Collaborative Strategies for Research, Empowerment, and Reconnecting with the Past. *Collaborative Anthropologies*, 11(1), 48-88.
<https://doi.org/10.1353/cla.2018.0001>
- Onkelinx, J., Manolova, T. S., & Edelman, L. F. (2016). The human factor: Investments in employee human capital, productivity, and SME internationalization. *Journal of International Management*, 22(4), 351-364.
<https://doi.org/10.1016/j.intman.2016.05.002>
- Pahlevi, A., & Rahab, R. (2022). The Effect Of Innovation, Tqm Implementation And Entrepreneurship Orientation On Competitive Advantage Strategies In Building Msme Performance. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(8).
<https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i8.545>
- Pantidi, N., Ferreira, J., Balestrini, M., Perry, M., Marshall, P., & McCarthy, J. (2015). Connected sustainability. *Proceedings of the 7th International Conference on Communities and Technologies*, 161-163.
<https://doi.org/10.1145/2768545.2768563>
- Paredes, F., Flores, D., Figueroa, A., Gaymer, C. F., & Aburto, J. A. (2019). Science, capacity building and conservation knowledge: The empowerment of the local community for marine conservation in Rapa Nui. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 29(S2), 130-137.
<https://doi.org/10.1002/aqc.3114>
- Payne, M. (2018). Social Construction in Social Work and Social Action. In *Constructing Social Work Practices* (pp. 25-66). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429460463-2>
- Prawira D., I. B. H., & Dewi, H. U. (2019). The analysis of factors that effect

- business development and income of MSMEs in Denpasar city. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 118–126. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.664>
- Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3058–3069. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3757>
- Rakhmawati, D., Nugroho, S., & Eriawaty, E. (2025). Sustainable Development Goals: Literasi Digitalisasi Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 244. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5872>
- Ridwan Maksum, I., Yayuk Sri Rahayu, A., & Kusumawardhani, D. (2020). A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 50. <https://doi.org/10.3390/joitmc6030050>
- Rwebugisa, L. J., & Usinger, J. (2021). Empowerment Through Genuine Participation: Giving Voice to the Neglected Majority. *Journal of Development Policy and Practice*, 6(2), 144–167. <https://doi.org/10.1177/24551333211035181>
- Souza, M. L. de. (2018). Oppressed, segregated, vulnerable. In *The Routledge Handbook of Latin American Development* (pp. 549–559). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315162935-47>
- Surin, E. F., . Mohd. H. F. H., . Mohd. N. S., & . M. H. M. H. (2015). Using the Social Network for Business Sustainability: Examining Start-up SME Firms in Malaysia. *Information Management and Business Review*, 7(5), 18–26. <https://doi.org/10.22610/imbr.v7i5.1171>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Zhong, M. (2020). Enhancing the Community Resilience with a Network Structuring Model. In *Flood Impact Mitigation and Resilience Enhancement*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.92715>